

JURNAL SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Disusun oleh:

PRASETYO PURBO WAHYONO

NPM : 09 05 10208
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

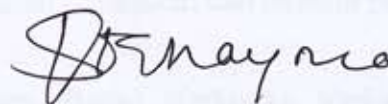
**TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN
PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**



NPM : 09 05 10208
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Januari 2014

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

TINJAUAN TERHADAP PROSES KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENUNTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Prasetyo Purbo Wahyono

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstrak. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika”. Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang dianggap luar biasa di antara dunia internasional. Hal ini menghambat perkembangan bangsa sebagaimana telah meracuni pikiran semua orang untuk tidak bisa berpikir jernih. Efek dari penggunaan narkotika dapat membuat seseorang kesadaran bahkan dapat berakhir pada kematian. Untuk mengatasi hal ini maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan dan prekursor narkotika. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. Jenis – jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengumpulan data.

Kata kunci : penyadapan, Badan Narkotika Nasional, narkotika, kejahatan narkotika

Abstract. The title of this legal writing is “Review of the wiretapping authority of the national narcotics agency in the completion of the crime of narcotics”. Narcotic crime is a crime that is considered exceptional among the international world . It inhibits the development of a nation as has been poisoning the minds of all people that can not think clearly . The effects of the use of narcotic dependence can make a person lose consciousness can even end in death . To overcome this particular agency handles formed on narcotics crimes . The agency is the National Narcotics Agency . The National Narcotics Agency is an agency set up specifically to deal with the crime of narcotic drugs and their precursors . It is responsible directly to the President . One such authority is tapping . Tapping is an activity or series of activities inquiry or investigation by way of intercepting conversations , messages , information , and / or network communication is done by phone and / or other electronic communication devices . Tapping has systematics are tapping phone , messaging , and places through GPS tracking . Wiretapping authority is in the process of proof search early , the head of the court for permission , transmission tracking , and data collection .

Keyword : Tapping, national narcotics agency, narcotics, narcotics crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masa sekarang tingkat kepedulian masyarakat terhadap keadaan suatu bangsanya telah berada dibawah titik nadir. Hal ini tidak terlepas dari telah terkontaminasinya pemikiran tersebut dengan masuknya racun – racun yang mempengaruhi. Salah satu racun yang telah merambah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹.

Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independen yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN mempunyai beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah penyadapan. Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan pioneer berdirinya BNN, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 4

alat komunikasi elektronik lainnya². Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkoba bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkoba yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkoba³.

Kewenangan mengenai penyadapan ternyata masih menyisakan tanda tanya besar dalam masyarakat terutama mengenai proses pelaksanaan penyadapan. Berawal dari kenyataan inilah maka judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Terhadap Proses Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penuntasan Tindak Pidana Narkotika”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba?
2. Apakah hambatan yang dialami dalam proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba?

Tinjauan Kewenangan BNN

1. Dasar Hukum BNN

Melalui Undang – undang nomor 7 tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 nomor 17, Indonesia juga mengesahkan Konvensi Wina tahun 1988. Berdasarkan Konvensi Wina 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika maka dibutuhkan ratifikasi dan pemerintah Indonesia telah menerbitkan 2 (dua) undang – undang, yaitu Undang –

²ibid, hlm. 6

³Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang – undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ⁴.

Merespon perkembangan permasalahan peredaran narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang - undang No. 22 Tahun 1997.

Badan Narkotika Nasional (BNN) ini dibentuk atas dasar hukum Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN sebagai badan yang menangani tentang tindak pidana narkotika mempunyai 3 pokok tugas utama, yaitu :

1. Pencegahan

Di dalam pencegahan ini BNN menitik beratkan kepada orang – orang yang belum pernah menggunakan supaya mereka tidak terpengaruh terhadap godaan – godaan yang datang, baik yang datang dari keluarga, teman, lingkungan, dan lain – lain.

2. Rehabilitasi

Tiik berat dalam rehabilitasi ini adalah mereka para pecandu narkotika untuk disembuhkan agar tidak lagi mengidap ketergantungan terhadap narkotika. Tempat rehabilitasi pecandu narkotika terbesar milik BNN terdapat di Lido, Bogor. Selain milik BNN, terdapat juga tempat

⁴*Ibid.* Hlm. 6

rehabilitasi yang dibuat oleh swadaya masyarakat sendiri. Salah satu contohnya adalah Kunci dan Al Islami.

3. Pemberantasan

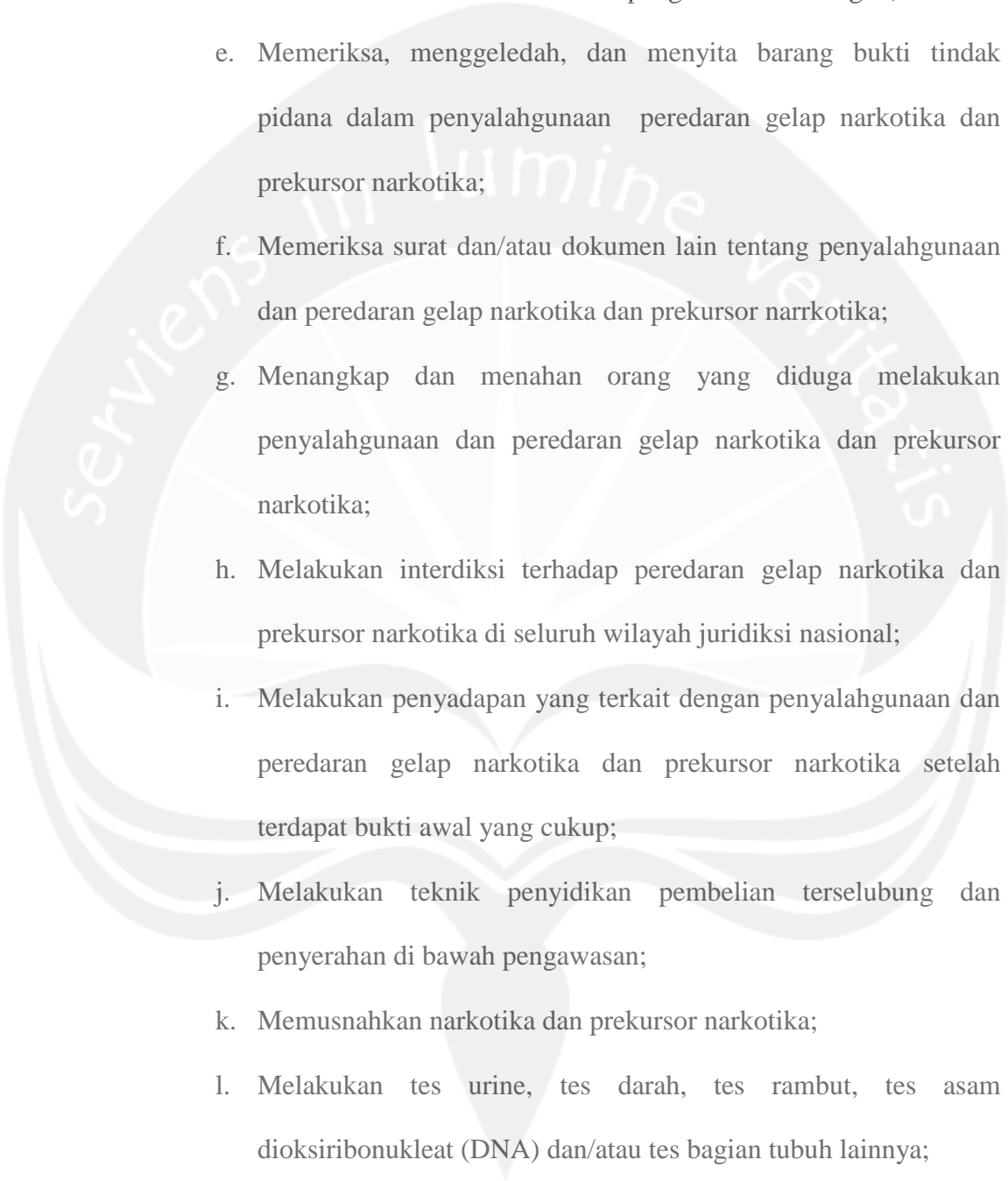
Dalam pemberantasan ini titik berat BNN lebih kepada pengedar, bandar, produsen, dan kurir narkoba maupun prekursor narkoba. Hal tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan narkoba maupun prekursor narkoba.

2. Kewenangan BNN dalam Penyidikan Narkoba

Proses penyidikan yang dilakukan BNN dalam menangani perkara narkoba mempunyai kekhususan dimana proses penyidikannya tidak hanya tertulis dalam KUHAP tetapi juga di dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pasal (75) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan mengenai kewenangan BNN melakukan penyidikan, yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

- 
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
 - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
 - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 - k. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba;
 - l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat – alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkoba

1. Tinjauan Umum Narkoba

Banyak pengertian mengenai narkoba. Narkoba juga dapat diartikan sebagai *narkose* artinya sama dengan anesti dan dipakai di daratan Eropa dan para dokter generasi lama ⁵. Obat yang dipakai untuk *narkose* adalah obat narkotik : *eter, nitrogen monoxide atau lachgas, cyclopropane* dan sebagainya, sehingga dikenal *eter narkose* dan sebagainya ⁶.

⁵Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 226

⁶*Ibid.*

Perkataan narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa ⁷. Dalam Encyclopedia Americana pengertian narkotika sebagai “*a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya ⁸.

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses frementasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah : ganja, hasis, opium, dan daun koka.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah : morfin, kodein, heroin, dan kokain.

3. Narkotika Sintesis

⁷Prof. Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 4, Alumni, Bandung, hlm. 36

⁸*Ibid.*

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah : petidin, methaden, dan nal trexon.

3. Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengekspor, mengimpor, menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli narkotika maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana narkotika. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal (111) sampai dengan Pasal (148) Undang -undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses Penyadapan BNN

1. Pengertian dan Pengaturan Penyadapan BNN

Penyadapan menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Penyadapan oleh BNN sebagaimana dimaksud Pasal (75) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam masa yang sama. Bukti atau *evidence* merupakan pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya ⁹.

2. **Prosedur Penyadapan BNN**

Prosedur yang biasa dilakukan para penyidik – penyidik BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam penyadapan BNN adalah :

- a) Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan normal.

SOP (*Standard Operasional Prosedur*) penyadapan dalam keadaan normal adalah telah ditemukan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang yang diduga akan melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dan dengan ijin Ketua Pengadilan. Penyadapan ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat ijin penyadapan oleh penyidik dari Ketua Pengadilan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu yang sama. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 77 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- b) Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak.

⁹Eddiy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, 1, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

Maksud dari keadaan mendesak ini menurut Kepala Bidang Pemberantasan BNN Yogyakarta AKBP. Sumargiyono, SST. Ft, SH adalah dimana seorang tersangka, baik bandar maupun kurir penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba tertangkap tangan atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk meminta izin kepada Ketua Pengadilan dan keadaan mendesak. SOP (*Standard Operasional Prosedur*) penyadapan dalam keadaan mendesak ini telah diatur didalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal (78) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu tanpa menunggu izin dari Ketua Pengadilan. Permohonan izin dilakukan setelah melakukan penyadapan dengan batas waktu 1 x 24 jam kepada Ketua Pengadilan.

3. Jenis – jenis Penyadapan BNN

Penyadapan yang dilakukan oleh BNN mempunyai beberapa jenisnya. Jenis - jenis penyadapan tersebut adalah :

a). Penyadapan secara langsung

Penyadapan ini dilakukan dengan menyadap pembicaraan langsung dari target yang akan disadap yang sedang menggunakan telepon. Penyadapan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari apa yang target bicarakan terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba.

b). Penyadapan pesan

Penyadapan ini dilakukan dengan cara membuka pesan dari target yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba melalui server pusat pesan. Penyadapan ini dilakukan dengan kerjasama dari operator sim card atau pun dari pusat pesan berasal (sebagai contoh penggunaan blackberry maka BNN bekerjasama dengan RIM sebagai pengelola pusat data blackberry untuk mengetahui isi dari hasil *blackberry messenger* (BBM).

c). Penyadapan posisi

Penyadapan posisi hampir sama dengan pencarian target untuk mengetahui posisinya dengan menggunakan GPS. Dimana dalam hal ini BNN dapat mengetahui posisi seorang target melalui sinyal yang dikeluarkan dari handphone (HP) target tersebut.

Hambatan Kewenangan Penyadapan BNN

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan suatu hambatan yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dari proses penyadapan yang berasal dari pengaruh dalam instansi itu sendiri. Hambatan – hambatan internal tersebut antara lain :

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di dalam BNN mempunyai keterbatasan. Keterbatasan anggota inilah yang mengakibatkan belum terlalu efektifnya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

b). Keahlian anggota BNN

Proses penyadapan tentu membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki sebagian orang. Anggota BNN rata – rata hanya memiliki *basic* atau dasar sebagai seorang penyidik tindak pidana biasa karena sebagian besar anggota BNN berasal dari kalangan kepolisian. Faktor itulah yang menyebabkan masih kurangnya anggota BNN yang menguasai tentang teknik maupun peralatan yang digunakan dalam proses penyadapan. Dampak dari hal tersebut proses penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba belum dapat dilakukan secara maksimal.

c). Alat – alat belum memadai

Alat – alat penyadapan yang dimiliki BNN kurang memadai dan kurang canggih sehingga dalam proses penyadapan tidak dapat berjalan dengan sempurna.

d). Alokasi dana terbatas

Alokasi dana yang diberikan dan dialokasikan oleh pemerintah masih kurang dalam pelaksanaan proses penyadapan yang dilakukan BNN. Hal itu mengakibatkan BNN tidak dapat memperbaharui peralatan yang dipakai dalam proses penyadapan.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar instansi itu sendiri yang meliputi :

a). Informasi server yang tidak cepat

Penyadapan melalui SMS maupun *Blackberry Massengger* (BBM) tentu membutuhkan kerjasama dengan server yang bersangkutan. Server dalam membaca sebuah kejadian harus membuka database terlebih dahulu. Pembacaan dari database tersebut membutuhkan waktu sehingga kejadian yang berlangsung sudah tidak sama dengan waktu kejadian di hari itu juga.

b). Peraturan Belum Memadai

Peraturan dari pemerintah yang masih belum lengkap terhadap kewenangan penyidikan menggunakan penyadapan. Selama ini peraturan tentang penyadapan khususnya yang dilakukan BNN hanya terdapat dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal (75) huruf (i). Belum adanya hukum acara atau peraturan tunggal yang mengatur tentang penyadapan mengakibatkan kewenangan penyadapan BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dapat dilemahkan.

c). Faktor Masyarakat

Pemahaman masyarakat mengenai penyadapan masih terlalu dangkal. Informasi yang didapat masyarakat belum sepenuhnya dipahami. Dampak dari hal ini adalah banyaknya masyarakat yang menentang penyadapan yang dilakukan BNN. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi mereka. Pemahaman seperti ini yang harus dikurangi. BNN hanya melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga atau terdapat bukti awal melakukan penyalahgunaan atau terlibat tindak pidana narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkoba diawali
 - a. Pencarian bukti permulaan yang didapat dari informasi masyarakat maupun informasi tersangka lain yang telah tertangkap sebelumnya.
 - b. Setelah ada bukti permulaan yang cukup, BNN segera mengajukan ijin penyadapan kepada Kepala Pengadilan dan dilanjutkan dengan pelacakan transmisi untuk pengumpulan data.
 - c. Data yang dikumpulkan oleh BNN digunakan sebagai bukti di pengadilan tentang keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba. Data di persidangan berupa *hard copy*

berbentuk kaset rekaman pembicaraan maupun transkrip percakapan.

2 Proses penyadapan oleh BNN dalam upaya penuntasan tindak pidana narkoba menemukan beberapa hambatan, antara lain :

- a. Hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya jumlah anggota BNN, kurangnya keahlian anggota BNN dalam hal pengoperasian peralatan yang digunakan dalam penyadapan, alat – alat yang belum memadai, dan alokasi dana yang terbatas untuk memperbaharui peralatan penyadapan yang telah ada dengan peralatan yang lebih modern.
- b. Hambatan yang bersifat eksternal yang meliputi informasi server yang tidak cepat, peraturan belum memadai, dan juga faktor masyarakat berkaitan dengan informasi mengenai proses penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Eddiy O.S. Hiariej, 2012 : *Teori & Hukum Pembuktian*, 1 ; Erlangga, Jakarta
- Njowito Hamdani. 1992 : *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 2 ; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soedjono D. 1977 : *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia* ; Karya Nusantara, Bandung
- 1985 : *Narkotika dan Remaja* ; Alumni, Bandung
- 1990 : *Hukum Narkotika Indonesia* ; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarto . 2010 : *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 4 ; PT. Alumni, Bandung
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2010 : *Narkotika dan Psikotropika* ; Nuansa Aulia, Bandung

Jurnal :

- Mardjono Reksodiputra. 1995 : *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI ; Jakarta

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang nomor 8 tahun 1986 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika